

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Damai
dalam
Keragaman**

**Bersatu
Membangun
Negeri**

JULI 2023

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk kurun waktu tahun 2024-2026. Dengan demikian, semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tantangan pembangunan kedepan, Materi Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Pontianak, Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. MANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670221 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.....	8
2.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan Nasional tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra juga berfungsi sebagai alat manajemen yang bertujuan untuk membantu suatu organisasi didalam menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai, dan secara komprehensif menjelaskan tentang langkah-langkah dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melalui penerapan berbagai strategi yang telah dipilih dan ditetapkan.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-

Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024 dan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Kalimantan Barat (Badan Kesbangpol) Tahun 2024–2026 merupakan serangkaian tindakan yang dibuat secara bersama oleh seluruh jajaran yang ada di Badan Kesbangpol, dengan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian tindakan sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Rangkaian tindakan yang telah disusun tersebut juga diharapkan mampu untuk menterjemahkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Badan Kesbangpol dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Renstra 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pebangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud.

Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesbangpol periode 2024-2026;
2. Menyusun program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat di urusan pemerintahan umum dalam jangka waktu tahun 2024-2026;
3. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu tahun 2024-2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Perencanaan Penganggaran;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
6. Membangun partisipasi stakeholder Badan Kesbangpol;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Badan Kesbangpol.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bab ini Memuat informasi tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan antara lain penjelasan renstra sebagai pedoman dalam penyusunan renstra, memuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja, serta memuat catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Badan Kesbangpol merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol kemudian dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- h. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi;
- i. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

1. penetapan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
2. perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
3. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
4. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

5. penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol. Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol;
5. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
11. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Membawahi:

1. Subbagian Umum dan Aparatur.

Subbagian Umum dan Aparatur bertanggung jawab kepada Sekretaris Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang politik dalam negeri.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang politik dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan

- umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
3. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan

daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk

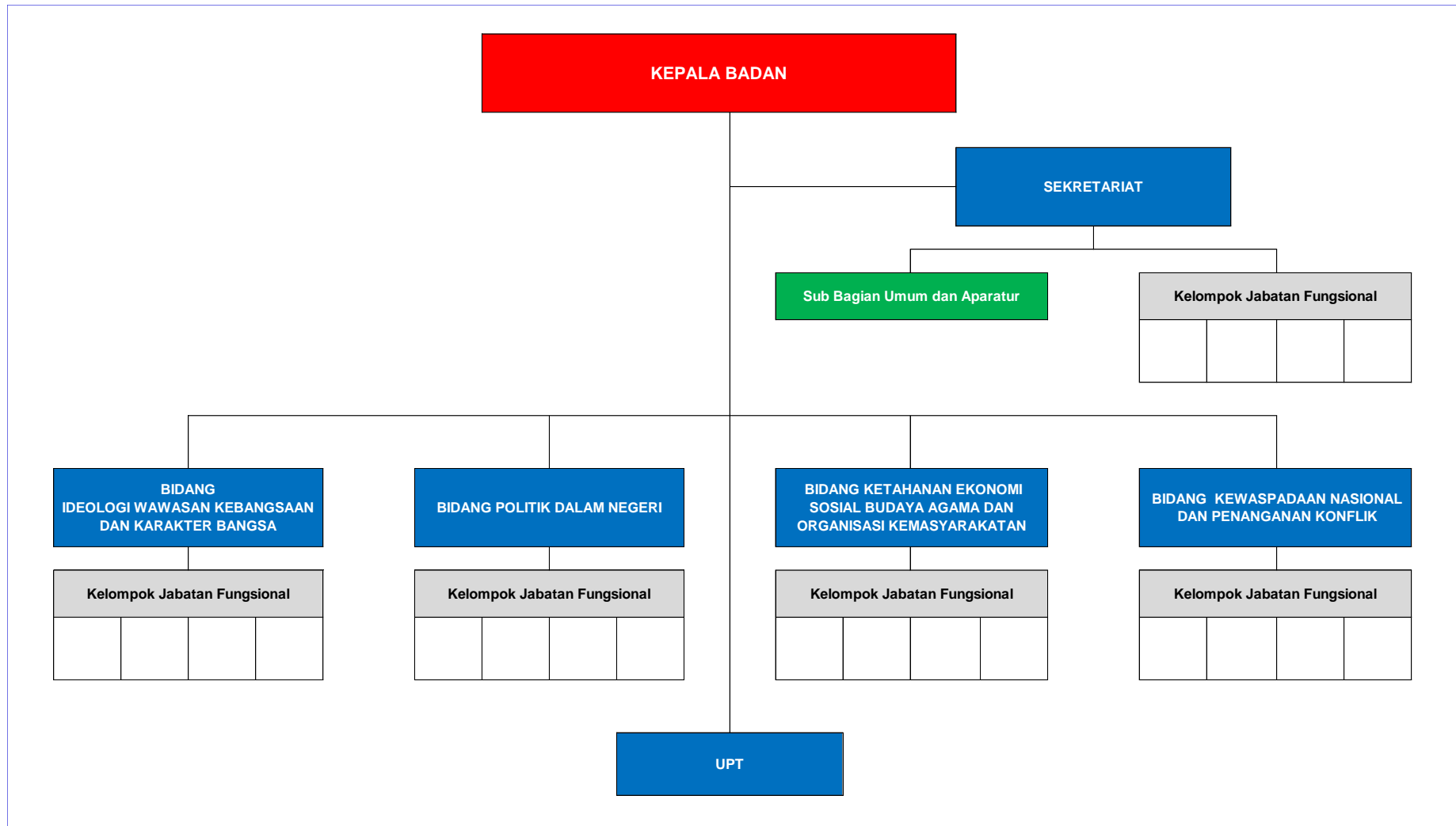
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban.

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang pegawai per 31 Januari 2023 yang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan;
- b. Tenaga Kontrak berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

Berikut tabel klasifikasi jumlah pegawai:

Tabel 1
Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Magister (S2)	6	4	10
2.	Sarjana (S1)	5	3	8
3.	Diploma 4	1	0	1
4.	Diploma 3	1	1	2
5.	SLTA	10	3	13
6.	SD	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		24	11	35

Tabel 2
Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	0	5
3.	Pembina (IV/a)	1	3	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	3	2	5
5.	Penata (III/c)	2	1	3
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	3	7
7.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	6	1	7
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		24	11	35

Tabel 3
Data PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
A.	JPT Pratama			
1.	Kepala Badan	1	0	1
B.	Jabatan Administrasi			
1.	Administrator	5	0	5
2.	Pengawas	0	1	1
3.	Pelaksana	14	6	20
C.	Jabatan Fungsional			
1.	Analisis Kebijakan	4	4	7
Jumlah Keseluruhan		24	11	35

Tabel 4
Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tenaga Administrasi	4	2	6
2.	Penjaga Malam	2	0	2
Jumlah Keseluruhan		6	2	8

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawannya Badan kesbangpol adalah tersedianya aset sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 5
Sarana

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer	-		38 Unit
2.	Printer	-		58 Unit
3.	Mesin Ketik	-		6 Unit
4.	Laptop	-		18 Unit

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
5.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Mitsubishi Pajero		1 Unit
6.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Nisan X Trail		1 Unit
7.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Mitsubishi Strada		1 Unit
8.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda		2 Unit

Tabel 6
Prasarana

NO.	TANAH DAN BANGUNAN	LUAS	KONDISI	JUMLAH BARANG
1.	Gedung	1938 m2	Baik	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun realisasi tingkat pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol tahun 2018-2023 secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol
Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Unit Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	97,77%	0	0																				
		Belanja Tidak Langsung		97,71			100	5.184,37 3.580,00	100	5.116,370,8 86,00					85,42	5.184,373,580,0	99,14	5,116,370,866,00								
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,04	0	0																				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	0	0	0	100	300.000,00	100	600,000,00					98,17	284,500,00	100	60,000,00	0,98	0,98	1,00	1,00				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	62,67	0	0	100	105.000,000,00	100	102,000,000,00					80,53	84,551,466,00	88,35	90,179,99,00	0,81	0,81	0,88	0,88				
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	0	0	0	100	15.000,000,00	100	3.500,000,00					67,66	10,588,370,00	99,99	3,499,570,00	0,68	0,68	1,00	1,00				
		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaran Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	78,61	0	0	100	7.300,000,00	100	17,300,000,00					70,73	5,163,600,00	27,32	4,726,500,00	0,71	0,71	0,27	0,27				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi, buku cek dan pulsa CMS	97,09	0	0	100	5.779,500,00	100	6.357,000,00					88,00	5,085,968,00	88,46	5,622,201,00	0,88	0,88	0,88	0,88				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	99,59	0	0	100	124,470,000,00	100	132,470,000,00					99,67	124,000,000,00	99,24	13,1458,000,00	1,00	1,00	0,99	0,99				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	100	0	0	100	55.880,500,00	100	50,101,800,00					99,99	55,885,000,00	99,99	50,094,600,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	0	0	100	37.769,800,00	100	38,855,500,00					100	37,769,800,00	99,99	38,855,500,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100	0	0	100	10.000,000,00	100	15,000,000,00					99,99	9,999,000,00	99,98	14,597,500,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	99,91	0	0	100	36.250,000,00	100	40,595,000,00					99,97	36,245,000,00	100	40,595,000,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	99,97	0	0	100	8.342,000,00	100	80,100,000,00					99,98	8,340,000,00	99,81	59,984,400,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perutusan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perutusan perundang-undangan	100	0	0	100	3.450,000,00	100	11,580,000,00					99,13	3,420,000,00	87,05	10,080,000,00	0,99	0,99	0,87	0,87				
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	100	0	0	100	66.000,000,00	100	60,650,000,00					99,95	65,985,900,00	99,97	60,625,500,00	1,00	1,00	1,00	1,00				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun					Unit Penanggung Jawab									
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																			
		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan hasil yang diperoleh/terhadap kelembagaan	96,97	0	0	100	320.162,013.00	100	243,673,264,00																														
		Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan/Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	99,83	0	0	100	316.807,550,00	100	348,382,705,44																														
		Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang	100	0	0	100	115.520,000,00	100	113,950,000,00																														
		Penyediaan Jasa Publikasi/ iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	100	0	0	100	17.650,000,00	100	31,600,000,00																														
		Perataan dan Pemeliharaan Aap	Jumlah asip yang terata	96,81	0	0	100	24.195,000,00	100	78,884,000,00																														
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		0	0																																		
		Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin	65,79	0	0																																		
		Pengadaan Perlengkapan/ Perlatan/Kantor	Jumlah perlengkapan dan perlatan kantor		0	0	100	35.650,000,00	100	99,292,500,00																														
		Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon			0	0	100	9.999,000,00																																
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	0	0	0	100	127.497,000,00																																
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		0	0	100	66.748,500,00	100	104,654,300,00																														
		Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara		0	0	100	10.000,000,00	100	8.647,000,00																														
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Perlatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terpelihara	100	0	0	100	44.375,000,00	100	48,800,000,00																														
		Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang dibutuhkan		0	0	100	0	0	0																														
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	terpeliharanya mebelair kantor		0	0	0	-	-	-																														
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		0	0																																		
		Pengadaan Pakain Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakain khusus dan perlengkapannya	93,76	0	0	100	34.100,000,00	100	137,450,000,00																														
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0	0																																		
		Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop guna menunjang tupoksi	100	0	0	0	-	100	8,364,000,00																														
		Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani	0	0	0	100	136.218,000,00	100	17,022,400,00																														

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun	Unit Penanggung Jawab												
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023				2019		2020		2021		2022		2023			
						6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16		17		18		19		20		21	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Perencanaan Standar Operasional Prosedur	Jumlah analisis jabatan	0	0	100	25.267,000.00																																
		Perencanaan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis jabatan yang tersedia	0	0	0	-	100	12,920.000.00																														
		Perencanaan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	0	0	100	13,931,000.00	100	15,000.00																														
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	0	0																																		
		Perencanaan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	100	0	0	35,250,000.00	100	34,796,400.00																														
		Perencanaan LAKP	Jumlah LAKP	100	0	0	15,000,000.00	100	15,000.00																														
		Perencanaan RENSTRA	Jumlah Renstra	0	0	0	28,020,000.00	100	25,000.00																														
		Perencanaan RENCANA SKPD	Jumlah Rencana SKPD	100	0	0	25,000,000.00	100	25,000.00																														
		Perencanaan dan Pelaporan LPKD dan LKPJ	Jumlah LPKD dan LKPJ	100	0	0	20,679,000.00	100	21,000.00																														
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	97,26	0	0	66,206,000.00																																
		Perencanaan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	100	0	0	25,000,000.00	100	27,000.00																														
		Perencanaan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti rakor perencanaan teknis	0	0	0	122,840,300.00	100	73,370,200.00																														
		PROGRAM PEMELIHARAAN, PENGUATAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHIT (ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN)	Jumlah Peremuan Unsur Umot Beragama di Kabupaten/Kota; Jumlah Kelompok Sasaran Kewaspadaan Diri yang dibentuk dan dibina; Perentase Penanganan Konflik Sosial	0	0																																		
		Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat yang dipantau	0	0	0	69,011,800.00	0	-																														
		Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah unsur FKUB yang dibina	0	0	0	-	100	2,160,000.00																														
		Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Pemilu	99,36	0	0	112,453,500.00																																
		Facilitasi/Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Prov. Kabat	Jumlah FKUB provinsi yang difasilitasi	0	0	0	462,801,000.00																																
		Pemutakhiran Data Peta Politik yang tersedia	Jumlah Data Peta Politik yang tersedia	99,97	0	0	0																																
		Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Peserta rakor FKUB	0	0	0	169,813,300.00																																
		Forum Komunikasi Parpol	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Parpol	0	0	0	-																																
		Facilitasi dan Pemantauan Forum Kewaspadaan Diri di Daerah	Jumlah Peserta Facilitasi dan Pemantauan Forum Kewaspadaan Diri di Daerah	0	0	0	125,643,500.00																																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun					Unit Penanggung Jawab										
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp					
1					6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	Rp	18	Rp	19	Rp	20	Rp	21	Rp	22			
		Pengembangan Multikultural bagi Penyuluh Agama	Jumlah Peserta pengembangan multikultural bagi penyuluh agama	0	0																																			
		Sosialisasi Budaya Politik Santunan	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Politik Santunan	0	0																																			
		Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Pata Politik	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Pata Politik	95,02	0	0																																		
		Facilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019	Jumlah Dukumen Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019 yang tersedia	0	0	0	100	68.011,800,00									90,1	62,182,200,00																						
		Sosialisasi Budaya Politik Santunan	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Politik Santunan	96,03	0	0																																		
		Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar	Jumlah peserta Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar	0	0	0																																		
		Birek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta Birek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Provinsi Kalimantan Barat	96,73	0	0																																		
		Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempun se Kalbar	Jumlah peserta penguatan kapasitas tokoh agama perempuan	0	0	0																																		
		Pembinaan Kepada Pata Politik	Jumlah Kepada Pata Politik yang dibina	0	0	0	100	48.812,800,00									91,24	44,535,200,00																						
		Dialog Lintas Agama di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta dialog	0	0	0																																		
		Pengembangan Multikultural pada Pelajar Menengah Atas	Jumlah peserta pengembangan multikultural	0	0	0	100	172.550,000,00									88,91	153,414,000,00																						
		Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah tindakan pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	100	166.649,800,00									96,05	160,63,300,00																						
		Pembinaan Kepada Pata Politik	Jumlah Pata Politik yang dibina	0	0	0																																		
		Pengembangan Kapasitas Tim Penyusun Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Daerah se Kalimantan Barat	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik	0	0	0																																		
		Pengembangan Kapasitas Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik	Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas generasi muda dan tokoh masyarakat dalam pencegahan konflik	0	0	0																																		
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat	0	0	0																																		
		Pemantauan Penanganan Masalah Kesehatan Bangsa dan Politik	Jumlah Lokasi pemantauan penanganan masalah kesehatan bangsa dan politik	0	0	0	100	42.914,400,00									42,57	42,914,400,00																						
		Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah	0	0	0																																		
		Pembinaan Tim Kewaspadaan Diri di Daerah	Jumlah Anggota Tim Kewaspadaan Diri Daerah	0	0	0																																		
		Penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyelundupan dan Peredaran Getap Narkoba	Jumlah Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyelundupan dan Peredaran Getap Narkoba	0	0	0	100	112.976,000,00									91,48	103,346,000,00																						
		Facilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Rapat Forkopmda yang terlaksana	0	0	0	0										0																							
		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	%	0	0	0																																		
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	0	0	0	100	82.430,600,00									95,95	82,430,600,00																						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Unit Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Pemutakhiran Data Omas se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Omas se Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta Peningkatan Kesadaran Bela Negara	99.63	0	0	100	134.234.300,00									98.73	134.234.300,00							
		Pembinaan Omas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Omas di Provinsi Kalimantan Barat yang dibuka	0	0												0.99	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	99.92	0	0	100	17.248,000,00									99.71	17.248,000,00							
		Realisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Jumlah Peserta Realisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	99.71	0	0	100	98.238,600,00									98.38	98.238,600,00							
		Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Omas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Omas di Provinsi Kalimantan Barat	0	0												-	-	-	-					
		Facilitasi Ketahanan Ekonomi	Jumlah Peserta Facilitasi Ketahanan Ekonomi	96.47	0	0											-	-	-	-					
		Temu Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa	Jumlah Peserta Temu Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa	97.61	0	0											-	-	-	-					
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0												-	-	-	-					
		Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	100	31.768,400,00										92.03	31.768,400,00							
		Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Barat	0	0												0.92	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Facilitasi Forum Pembauran Bangsa	Jumlah Peserta Facilitasi Forum Pembauran Bangsa	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Peserta Peningkatan Kesadaran Bela Negara	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pembinaan Omas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Prov. Kalbar	Jumlah Omas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Prov. Kalbar yang dibuka	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Realisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Jumlah Peserta Realisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pemutakhiran Data Omas se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Omas se Kalimantan Barat	0	0	100	36.181,400,00										99.91	36.181,400,00							
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai kebangsaan	Jumlah Peserta Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Kebangsaan	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pengutan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Pengutan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Peserta Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	%	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Risiko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada	0	0	100.00	105.833.500,00										94.20	105.833.500,00							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)										Realisasi Capaian Tahun										Unit Penanggung Jawab
					Target Capaian pada					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun										
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	99.11	0	0										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Rapat Koordinasi dalam Penetapan Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dalam Penetapan Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU	Jumlah Peserta Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pembinaan Kepada Partai Politik	Jumlah Peserta Pembinaan Kepada Partai Politik	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Facilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Facilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Facilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri di Daerah	Facilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri di Daerah	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Facilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat di Daerah	Jumlah Peserta Facilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat di Daerah	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Baruan Keuangan Partai Politik	Jumlah Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Baruan Keuangan Partai Politik	0	0	100	52.075,000.00				89.53	52.075,000.00				0.90	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	Jumlah Kab/Kota yang di Pantau Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	97.6	0	0										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Kaltar	Jumlah Peserta fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Kaltar	97.01	0	0										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Dialog Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Dialog Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat	Jumlah Peserta Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat	0	0											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Pemantauan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kaltar	Jumlah Kab/Kota yang di Pantau Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kaltar	99.11	0	0										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	98.25	0	0										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyusunan Rapsda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Penyusunan Rapsda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	0	0	0										-	-	-	-						
		Pemantauan Kebebasan dan Kegiatan Orang Asing di daerah	Jumlah Kebebasan dan Kegiatan Orang Asing di daerah	88.26	0	0										-	-	-	-						
		Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0										-	-	-	-						
		Sosialisasi Budaya Politik Santun	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Politik Santun	0	0	100	333.761.000.00				93.33	333.761.000.00				6.67	-	-	-						
		FGD Pengembangan Etika dan Budaya Politik Santun	Jumlah Peserta FGD Pengembangan Etika dan Budaya Politik Santun	0	0											-	-	-	-						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun	Unit Penanggung Jawab											
					2019					2020					2021					2022							2023										
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16		17		18		19		20		21
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1		Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat	0	0																																
		Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	0	0																																
		Dialog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat	Salog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat	0	0																																
		Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan	Jumlah Peserta Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan	0	0																																
		Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda	0	0																																
		Lomba Pidato Etnik dan Budaya Politik tingkat Menengah Atas	Jumlah Peserta Lomba Pidato Etnik dan Budaya Politik tingkat Menengah Atas	0	0																																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,25	7.772,217.038,00			97,75	7.362.787.923,00	97,95	7.814.781.438,00	98,25	7.772.217.038,00					92,62	6.819,571.127,00	92,62	4.933.617.917,00	98,25	7.772.217.038,00							0,95	0,93	0,95	0,63	-	-		
		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang SPangkat Daerah	98,25	157.799.600,00			97,75	113.951,558,00	97,95	140.673,100,00	98,25	157.799,600,00					95,09	108.354,244,00	65,97	92.799,247,00	98,25	157.799,600,00									0,97	0,95	0,67	0,66	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,25	6.375,456.323,00			97,75	6.410,696.188,00	97,95	6.378.784.523,00	98,25	6.375.458.323,00					91,85	5.888,215.819,00	62,97	4.017,013.279,00	98,25	6.375.458.323,00									0,94	0,92	0,64	0,63	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98,25	3.500,000,00			97,75	3.500,000,00	97,95	3.500,000,00	98,25	3.500,000,00					99,38	3.478,313,00	0	-	98,25	3.500,000,00									1,02	0,99	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,25	194,057.900,00			97,75	104.441,200,00	97,95	74.816,400,00	98,25	194,057,900,00					95,76	100,016,600,00	75,68	56,619,146,00	98,25	194,057,900,00									0,98	0,96	0,77	0,76	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,25	342,612.015,00			97,75	310,504,398,00	97,95	469,366,430,00	98,25	342,612,015,00					99,93	310,284,326,00	64,42	302,375,894,00	98,25	342,612,015,00									1,02	1,00	0,82	0,64	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,25	559,614.800,00			97,75	290,927,764,00	97,95	557,486,548,00	98,25	559,614,800,00					98,29	270,504,650,00	61,63	343,577,049,00	98,25	559,614,800,00									0,99	0,96	0,63	0,62	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,25	139,174.400,00			97,75	138,767,815,00	97,95	190,148,037,00	98,25	139,174,400,00					99,96	138,717,175,00	63,76	121,233,302,00	98,25	139,174,400,00									1,02	1,00	0,65	0,64	-	-
		PROGRAM PENGUATAN IDEKI DAN PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	413,730.900,00			97,75	399,944,325,00	100	380,148,900,00	100	413,730,900,00					99,95	399,944,325,00	68,36	259,881,581,00	100	413,730,900,00									1,02	1,00	0,68	0,68	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan/ Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan/ Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	100	413,730.900,00			97,75	399,944,325,00	100	380,148,900,00	100	413,730,900,00					99,95	399,763,221,00	68,36	259,881,581,00	100	413,730,900,00									1,02	1,00	0,68	0,68	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	98,25	107,138.091,800,00			97,75	4.028,577.637,00	97,95	7.082,880.300,00	98,25	107,138,091,800,00					99,97	4.027,269.707,00	99,81	7.069,106.687,00	98,25	107,138,091,800,00									1,02	1,00	1,02	1,00	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan/ Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etnik Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebangsaan Pemerintahan, Perwalian dan Parasi Politik, Pembinaan/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemenuhan Situasi Politik	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan/ Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etnik Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebangsaan Pemerintahan, Perwalian dan Parasi Politik, Pembinaan/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemenuhan Situasi Politik yang disusun	98,25	107,138.091,800,00			97,75	4.028,577.637,00	97,95	7.082,880.300,00	98,25	107,138,091,800,00					99,97	4.027,269.707,00	99,81	7.069,106.687,00	98,25	107,138,091,800,00									1,02	1,00	1,02	1,00	-	-
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemerdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	98,25	299,554.000,00			97,75	351,367,960,00	97,95	206,992,100,00	98,25	299,554,000,00					99,82	350,723,994,00	50,35	104,217,660,00	98,25	299,554,000,00									1,02	1,00	0,51	0,50	-	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun										Unit Penanggung Jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1						6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun			98.25	299.554,000.00					97.75	351.367,960.00	97.95	206.992,100.00	98.25	299.554,000.00					99.82	350.723,994.00	50.35	104.217,660.00	98.25	299.554,000.00							1.02	1.00	0.51	0.50	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penersepsi Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			98.25	206.750,000.00					97.75	408.196,415.00	97.95	20.156,531,600.00	98.25	206.750,000.00					99.84	407.552,449.00	99.91	20.138,920,940.00	98.25	206.750,000.00							1.02	1.00	1.02	1.00	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disusun			98.25	206.750,000.00					97.75	408.196,415.00	97.95	20.156,531,600.00	98.25	206.750,000.00					99.84	407.552,449.00	99.91	20.138,920,940.00	98.25	206.750,000.00							1.02	1.00	1.02	1.00	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penersepsi Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			98.25	1,600,432,400.00					97.75	910,817,085.00	97.95	1,571,384,300.00	98.25	1,600,432,400.00					97.06	884,024,155.00	60.46	950,056,050.00	98.25	1,600,432,400.00							0.99	0.97	0.62	0.60	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun			98.25	1,600,432,400.00					97.75	910,817,085.00	97.95	1,571,384,300.00	98.25	1,600,432,400.00					97.06	884,024,155.00	60.46	950,056,050.00	98.25	1,600,432,400.00							0.99	0.97	0.62	0.60	-	-

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator yang fluktuatif di dalam pencapaian target kinerja antara lain adanya Perubahan terkait Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Data untuk tahun 2018 s.d. 2023 terjadi Rasionalisasi dan efisiensi anggaran sehingga berimplikasi hambatan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar di dalam pencapaian target kinerja. Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Rasionalisasi dan efisiensi anggaran tersebut berimplikasi hambatan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar di dalam pencapaian target kinerja. Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan harus ditunda sampai dengan tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dimaksud.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol selama 5 tahun terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah : a. Terkait penyebaran faham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut; b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat; Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk menciptakan keadaan Kamtrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol antara lain:

1. Perangkat Daerah berjumlah 45
2. Instansi Vertikal berjumlah 44
3. Lembaga Pendidikan:
 - a. SMA Negeri dan Swasta berjumlah 459
 - b. SMK Negeri dan Swasta berjumlah 228
 - c. SLB negeri dan Swasta berjumlah 24

- d. Perguruan Tinggi berjumlah 96
- e. MA Negeri dan Swasta berjumlah 146
- 4. Organisasi Kemasyarakatan berjumlah 649
- 5. Organisasi Kepemudaan berjumlah 8
- 6. Sanggar Seni dan Budaya berjumlah 585
- 7. Lembaga Keagamaan berjumlah 8
- 8. FKDM berjumlah 14
- 9. UMKM berjumlah 196.656
- 10. Partai Politik berjumlah 18

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana pemerintahan yang beragam suku, ras, agama dan budaya berdampak meningkatnya potensi konflik sosial yang cukup tinggi dan dapat mengancam integrasi nasional. Dari permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai Tantangan dan Peluang yang dihadapi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain:

1. Tantangan
 - a. Tantangan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
 - 1) Ada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga menjadi tantangan sekaligus ancaman dalam peningkatan wawasan kebangsaan, Ideologi dan bela negara
 - 2) Perlu pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai ideologi Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - 3) Kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen
 - b. Tantangan Bidang Politik dalam Negeri
 - 1) Perlunya pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi
 - 2) Penguatan infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi
 - 3) Adanya potensi disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat konflik politik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan
 - 4) Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi
 - 5) Jumlah Pemilih Pemula yang semakin meningkat setiap tahunnya
 - c. Tantangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Meningkatnya Keberadaan Ormas
 - 2) Meningkatnya Penyalahgunaan dan Peredaran narkoba

- 3) Meningkatnya sikap intoleransi dan radikalisme
 - 4) Meningkatnya jumlah penduduk dan kesenjangan ekonomi
 - 5) Berkembangnya Teknologi Informasi dan Budaya Asing yang mempengaruhi budaya lokal
- d. Tantangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya penanganan konflik dan paham terorisme serta radikalisme di masyarakat
 - 2) Minimnya data kasus konflik sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang penanganan konflik
 - 3) Keberadaan orang asing yang berada di wilayah Kalimantan Barat masih banyak yang belum terpantau
 - 4) Belum tersedianya Indeks Kewaspadaan Nasional
2. Peluang
- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- 1) Adanya Program/Kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Bela Negara
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang efektif dan efisien
 - 3) Adanya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4) Adanya bantuan hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan
- b. Bidang Politik dalam Negeri
- 1) Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik
 - 2) Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
 - 3) Berkembangnya partisipasi politik masyarakat
 - 4) Semakin mudahnya memperoleh berbagai informasi politik maupun informasi lainnya melalui berbagai media baik lembaga pemerintah maupun lembaga resmi lainnya
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- 1) Partisipasi Ormas dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional
 - 2) Peran Aktif Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan harmonisasi dan moderasi beragama
 - 3) Peran Aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - 4) Pertumbuhan UMKM
 - 5) Pelestarian kebudayaan daerah
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya penanganan konflik dan paham terorisme serta radikalisme di masyarakat
 - 2) Penyediaan data kasus konflik sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang penanganan konflik

- 3) Penyediaan data orang asing yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kewaspadaan dini
- 4) Penyediaan Indeks Kewaspadaan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

a. Pelayanan Internal

- 1) Izin Belajar/Tugas Belajar
- 2) Penerbitan Surat Keterangan
- 3) Rekap Kinerja PNS
- 4) Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
- 5) Pembinaan PNS
- 6) Cuti PNS
- 7) Penerbitan PAK
- 8) Pemilihan Pegawai Terbaik
- 9) Usulan ASN Teladan
- 10) Pengajuan Mutasi Keluar
- 11) Penyusunan Buku DUK
- 12) Pengusulan SLKS
- 13) Pengusulan Ujian Dinas
- 14) Pengumpulan SKP
- 15) Pengusulan Diklat
- 16) Pengusulan Kenaikan Pangkat
- 17) Pengusulan Perubahan Jabatan Fungsional
- 18) Pengusulan Perubahan Status CPNS
- 19) Penjatuhan Hukuman Disiplin
- 20) Pengajuan Pensiun
- 21) Pelayanan Usulan Taspen
- 22) Pelayanan Tamu
- 23) Pelayanan Konsultasi
- 24) Pengagendaan Surat
- 25) Permintaan Penomoran
- 26) Pengurusan Surat Keluar
- 27) Pengurusan Surat Masuk
- 28) Penerbitan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
- 29) Penerbitan Surat Perintah Tugas
- 30) Pengajuan Usulan LP2P
- 31) Persiapan Pelaksanaan Rapat
- 32) Pengamanan Kantor
- 33) Pengurusan Barang Pakai Habis
- 34) Penggunaan Tempat
- 35) Penanganan Rumah Tangga Kantor

- 36) Penghapusan Arsip
- 37) Peminjaman Kendaraan Dinas
- 38) Penyusunan Rencana Strategis
- 39) Penyusunan Rencana Kerja
- 40) Penyusunan RKA SKPD
- 41) Penyusunan DPA SKPD
- 42) Penyusunan RKA SKPD Penyempurnaan/Perubahan
- 43) Penyusunan DPA SKPD Penyempurnaan/Perubahan
- 44) Pengumpulan Data Kinerja
- 45) Perbaikan Data Kinerja
- 46) E-Kinerja
- 47) Penyusunan Manajemen Resiko
- 48) Monev Kinerja
- 49) Pelaksanaan dan Pelaporan Monev
- 50) Penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja/LKPJ/LPPD
- 51) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- 52) Pencatatan Buku Kas Umum (BKU)
- 53) Pembayaran Pajak
- 54) Pengajuan SPM Gaji
- 55) Pengajuan SPM GU
- 56) Pengajuan SPM TU
- 57) Pengajuan SPM LS
- 58) Pengajuan Dana UP
- 59) Pengajuan Belanja *Online*
- 60) Pencairan Dana Kegiatan
- 61) Pelaksanaan Verifikasi SPJ
- 62) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- 63) Penyusunan Laporan Keuangan
- 64) Penyusunan CaLK
- 65) Penerimaan Barang Inventaris
- 66) Pengeluaran Barang Inventaris
- 67) Pengadaan/Pemeliharaan Barang
- 68) Pengurusan Barang
- 69) Penghapusan Barang
- 70) Penyimpanan Barang
- 71) Penyusunan RKBMD
- b. Pelayanan Eksternal
 - 1) Fasilitasi Penyediaan Narasumber
 - 2) Pelaksanaan Lomba
 - 3) Pemberitahuan/Pemanggilan Peserta Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dialog/FGD/Talkshow/Rapat Koordinasi
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dialog/FGD/Talkshow/Rapat Koordinasi
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dialog/FGD/Talkshow/Rapat Koordinasi Virtual

- 6) Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Nasional
- 7) Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Nasional Virtual
- 8) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik Baru
- 9) Verifikasi dan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
- 10) Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik
- 11) Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten/Kota
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
- 13) Pelaporan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
- 14) Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat Tidak berbadan Hukum
- 15) Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum
- 16) Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Proposal Dana Hibah
- 17) Verifikasi Pencairan Dana Hibah
- 18) Penyampaian Pelaporan P4GN
- 19) Pemberian Pertimbangan Teknis Usulan Penelitian
- 20) Pelaporan Situasi Daerah
- 21) Penanganan Konflik Sosial
- 22) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing/Peneliti Asing/Lembaga Asing
- 23) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi yaitu:

- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut:
 1. Masih kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara bagi generasi muda
 2. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat
 3. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin mengganti dengan ideologi lain
 4. Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman
 5. Masih Kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku serta umat beragama
- b. Bidang Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:
 1. Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan, antara lain Netralitas ASN, Politik Identitas dan Politisasi SARA, Hoaks di Media Sosial, Kampanye Hitam dan lain sebagainya
 2. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi terutama pada Infra Struktur Politik
 3. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:
 1. Masih banyaknya Ormas yang belum memahami ketentuan peraturan perundang-Undangan dan belum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan AD/ART Ormas
 2. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba (Penelitian BNN bersama BRIN, BPS Tahun 2021: Prevalensi naik dari 1,80% menjadi 1,95%)
 3. Berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme yang telah mengarah pada aksi anarkisme terhadap kelompok tertentu
 4. Belum meratanya tingkat Perekonomian di daerah Kalimantan Barat;
 5. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya asli masyarakat Kalbar

- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :
 1. Belum efektifnya monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah
 2. Masih kurangnya dukungan antar Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan Forum Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam deteksi dan cegah dini
 3. Tingkat Kerawanan Konflik di Kalimantan Barat sangat tinggi
 4. Masih berkembangnya paham terorisme dan radikalisme di masyarakat

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbul nya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Kalimantan Barat, dapat dikemukakan isu strategis yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
 - a) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan
 - b) Penguatan karakter bangsa dan Bela Negara bagi generasi muda
 - c) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Bidang Politik Dalam Negeri.
 - a) Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
 - b) Penguatan Etika dan Budaya Politik
 - c) Penguatan Kelembagaan Demokrasi
 - d) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Masyarakat.
 - a) Penguatan peran Ormas.
 - b) Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan Harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan moderasi beragama.
 - c) Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat.
4. Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - a) Penguatan kewaspadaan dini di masyarakat.
 - b) Pencegahan Konflik Sosial masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan.

Tujuan Renstra masa transisi ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi

a. Tujuan

Tujuan dalam menangani isu strategis daerah serta memecahkan permasalahan yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2024-2026, yaitu :

- 1) “Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik”.**

b. Sasaran

Sebagai sasaran dari masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2024-2026, yaitu :

- 1) “Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik”**
- 2) “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik”.**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga dalam periode waktu 2024-2026, yakni dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 8 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	32,61	44,59	58,44
		1. Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	32,61	44,59	58,44
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	B (87,90)	B (88,10)	B (88,30)
			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B (66,10)	B (68,10)	BB (70,20)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	B (66,10)	B (68,10)	BB (70,20)

Keterangan:

Kelompok Masyarakat antara lain:

No	Kelompok Masyarakat	Jumlah
1	Perangkat Daerah	45
2	Instansi Vertikal	44
3	Lembaga Pendidikan:	
	a. SMA Negeri dan Swasta	459

No	Kelompok Masyarakat	Jumlah
	b. SMK Negeri dan Swasta	228
	c. SLB negeri dan Swasta	24
	d. Perguruan Tinggi	96
	e. MA Negeri dan Swasta	146
4	Organisasi Kemasyarakatan	649
5	Organisasi Kepemudaan	8
6	Sanggar Seni dan Budaya	585
7	Lembaga Keagamaan	8
8	FKDM	14
9	UMKM	196.656
10	Partai Politik	18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program prioritas dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan Operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Kebijakan sendiri merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Strategi dan kebijakan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yakni:

Tabel 9 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Peningkatan nasionalisme, karakter Bangsa, Bela Negara dan penguatan nilai-nilai Ideologi Pancasila

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Pemantapan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik dalam rangka Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Peningkatan Pendidikan Politik, Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam rangka pengembangan Etika dan Budaya Politik
		Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan menuju kesejahteraan masyarakat yang madani	Meningkatkan peran Ormas dalam menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional serta Fasilitasi dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan harmonisasi dan moderasi beragama serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah dan penanganan konflik	Meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional di Daerah dan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial serta Kerjasama Intelijen

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka waktu Periode 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan Kegiatan antara lain:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - h) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g) Penyediaan Bahan/Material
 - h) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - d) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - f) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - h) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,** dengan Kegiatan antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- f) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan Kegiatan antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,** dengan Kegiatan antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - c) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - e) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya,** dengan Kegiatan antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**, dengan Sub Kegiatan antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Kegiatan antara lain:
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026 di lingkungan Badan Kesbangpol beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 10 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	17,85	32,61	656.364.000.000	44,59	34.293.500.000	58,44	35.108.500.000	58,44	725.766.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar	
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		8 01	BADAN KESBANGPOL Provinsi KALBAR	Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	17,85	32,61	656.364.000.000	44,59	34.293.500.000	58,44	35.108.500.000	58,44	725.766.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar	
		8 01 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36,47	42,49	11.573.500.000	71,89	12.713.500.000	100,00	13.583.500.000	100	37.870.500.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,81	32,81	340.000.000	65,63	380.000.000	100,00	450.000.000	100,00	1.170.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	80.000.000	2	80.000.000	3	90.000.000	7	250.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itikisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Itikisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itikisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	36	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	60.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	9	170.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,32	57,35	7.130.000.000	78,68	7.630.000.000	100,00	8.170.000.000	100,00	22.930.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	35	49	6.500.000.000	49	7.000.000.000	49	7.500.000.000	49	21.000.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	210.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	36	900.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	220.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	70.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	145.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	230.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	33,33	33,33	103.500.000	66,67	133.500.000	100,00	163.500.000	100,00	400.500.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	3	10.500.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	12	75.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,90	36,93	340.000.000	74,37	600.000.000	100,00	535.000.000	100,00	1.475.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	2	25.000.000	4	250.000.000	2	150.000.000	8	425.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	49	35.000.000	49	40.000.000	49	45.000.000	147	120.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	36	49	35.000.000	49	40.000.000	49	45.000.000	147	120.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	70.000.000	15	75.000.000	15	80.000.000	45	225.000.000	Bidang Sekretariat	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar
		8 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	15	70.000.000	15	75.000.000	15	80.000.000	45	225.000.000	Bidang Sekretariat	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	15	70.000.000	15	75.000.000	15	80.000.000	45	225.000.000	Bidang Sekretariat	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar
		8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	34,00	34,00	725.000.000	67,00	865.000.000	100,00	1.010.000.000	100,00	2.600.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	3	65.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	245.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	245.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	245.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	3	180.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	15.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	6	65.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material Yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Laporan	12	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	36	120.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	36	750.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	1	110.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	3	430.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terakomodirnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,67	33,33	1.050.000.000	66,67	1.050.000.000	100,00	1.050.000.000	100,00	3.150.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	900.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,33	33,33	455.000.000	66,67	505.000.000	100,00	555.000.000	100,00	1.515.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	3	750.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	64,42	78,85	1.430.000.000	89,42	1.550.000.000	100,00	1.650.000.000	100,00	4.630.000.000	Bidang Sekretariat	
		8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	350.000.000	1	385.000.000	1	410.000.000	1	1.145.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	4	350.000.000	4	385.000.000	4	410.000.000	4	1.145.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62	62	100.000.000	62	150.000.000	62	200.000.000	62	450.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	240.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	Bidang Sekretariat	Pontianak
		8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26,08	41,49	7.225.000.000	53,35	3.675.000.000	77,65	4.200.000.000	77,65	15.100.000.000	Bidang Dewangkasa	
		8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26,08	41,49	7.225.000.000	53,35	3.675.000.000	77,65	4.200.000.000	77,65	15.100.000.000	Bidang Dewangkasa	
		8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang Dewangkasa	Pontianak
		8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Dewangkasa	Pontianak
		8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	480	780	5.625.000.000	800	2.300.000.000	820	2.600.000.000	2400	10.525.000.000	Bidang Dewangkasa	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	280	625.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	880	1.125.000.000	Bidang Dewangkasa	Pontianak
		8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	4	325.000.000	4	375.000.000	6	450.000.000	14	1.150.000.000	Bidang Dewangkasa	Kab/Kota Se Kalbar
		8 01 02 1.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	6	350.000.000	8	450.000.000	12	600.000.000	26	1.400.000.000	Bidang Dewangkasa	Kab/Kota Se Kalbar

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	13,33	30,77	631.020.000.000	44,73	10.800.000.000	44,73	9.400.000.000	44,73	651.220.000.000	Bidang Poldagri	
		8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13,33	30,77	631.020.000.000	44,73	10.800.000.000	44,73	9.400.000.000	44,73	651.220.000.000	Bidang Poldagri	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang Poldagri	Pontianak
		8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Poldagri	Pontianak
		8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	415	1800	630.000.000.000	415	10.000.000.000	425	8.500.000.000	2640	648.500.000.000	Bidang Poldagri	Kab / Kota Se Kalbar

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140	340	370.000.000	60	100.000.000	60	150.000.000	460	620.000.000	Bidang Poldagri	Pontianak
		8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7	14	350.000.000	14	400.000.000	14	450.000.000	14	1.200.000.000	Bidang Poldagri	Kab / Kota Se Kalbar
		8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35,44	57,01	1.600.000.000	78,58	1.330.000.000	97,07	1.400.000.000	97,07	4.330.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	
		8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35,44	57,01	1.600.000.000	78,58	1.330.000.000	97,07	1.400.000.000	97,07	4.330.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	230	140	840.000.000	140	400.000.000	140	400.000.000	420	1.640.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	70	110.000.000	100	230.000.000	150	250.000.000	320	590.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	14	350.000.000	14	400.000.000	14	450.000.000	14	1.200.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Kab/Kota Se Kalbar
		8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,09	0,32	1.325.000.000	0,55	1.700.000.000	0,78	1.750.000.000	0,78	4.775.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	
		8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,09	0,32	1.325.000.000	0,55	1.700.000.000	0,78	1.750.000.000	0,78	4.775.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	
		8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320	250	425.000.000	450	750.000.000	450	750.000.000	1150	1.925.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	300	750.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Pontianak
		8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	14	350.000.000	14	400.000.000	14	450.000.000	42	1.200.000.000	Bidang KESBA dan Ormas	Kab/Kota Se Kalbar

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat	13,98	32,62	3.620.500.000	51,26	4.075.000.000	69,90	4.775.000.000	69,90	12.470.500.000	Bidang KNPK	
		8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	13,98	32,62	3.620.500.000	51,26	4.075.000.000	69,90	4.775.000.000	69,90	12.470.500.000	Bidang KNPK	
		8 01 06 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bidang KNPK	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang KNPK	Pontianak
		8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80	335	595.000.000	400	450.000.000	450	550.000.000	1185	1.595.000.000	Bidang KNPK	Pontianak
		8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	320	360	375.500.000	450	425.000.000	500	475.000.000	1310	1.275.500.000	Bidang KNPK	Pontianak

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024 (Tahun ke-2)		Tahun 2025 (Tahun ke-3)		Tahun 2026 (Tahun ke-4)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	14	350.000.000	14	400.000.000	14	450.000.000	42	1.200.000.000	Bidang KNPK	Kab/Kota Se Kalbar
		8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4	4	2.000.000.000	4	2.500.000.000	4	3.000.000.000	12	7.500.000.000	Bidang KNPK	Pontianak

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan, Badan Kesbangpol memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas.

Adapun indikator sasaran yang telah di tetapkan oleh perangkat daerah Badan Kesbangpol yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 11 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun-n	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	9
1.	Indeks Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	17,85	32,61	44,59	58,44	58,44
2.	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26,08	41,49	53,35	77,47	77,65
3.	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	13,33	30,77	44,73	44,73	44,73

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun-n	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	9
4.	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35,44	57,01	78,58	97,07	97,07
5.	Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,09	0,32	0,55	0,78	0,78
7.	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat	13,98	32,62	51,26	69,90	69,90
8	Meningkatnya Predikat RB dan SAKIP	B (64)	B (66,10)	B (68,10)	BB (70,20)	BB (70,20)

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pada masa transisi yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2024-2026, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, maka setiap Bidang dan Sekretariat dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pada periode 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dimaksud sangat ditentukan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik provinsi Kalimantan Barat dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Pontianak, Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. MANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670221 198603 1 004